

**STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH DALAM MENGATASI DAMPAK JALAN TOL  
(Studi UMKM Kelurahan Yukum Jaya)**

**Oleh  
Yopi Pradana**

**Skripsi**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM MENGATASI DAMPAK JALAN TOL (Studi UMKM di Kelurahan Yukum Jaya)**

**Oleh :  
Yopi Pradana**

Peresmian jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas bakauheni-terbanggi besar pada jumat 8 maret 2019 menjadikan laju lalu lintas lebih efektif. Jalan tol sepanjang 143 kilometer itu membuat banyak kendaraan yang turun dari kapal di pelabuhan bakauheni sebagian besar langsung masuk ke jalan tol. Tentu hal ini banyak menimbulkan banyak dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu laju lalu lintas lebih lancar dan efektif. Salah satu dampak negative pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar adalah menurunnya pendapatan UMKM masyarakat salah satunya yang ada di jalan lintas tengah Sumatera. Menurunnya pendapatan disebabkan menurunnya volume kendaraan yang melintas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung tengah meluncurkan program Aplikasi UMKM Berjaya. Sebuah aplikasi digital yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli dan dilanjutkan dengan transaksi. Yang tentu tujuan program ini adalah meningkatkan perekonomian kerakyatan dalam hal ini adalah UMKM di Kabupaten Lampung Tengah Khususnya Kelurahan Yukum Jaya atau yang terdampak jalan tol. Program ini di evaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William dunn. Efektivitas aplikasi ini dalam cukup efektif namun masih banyak yang harus ditambah dan diperbaiki seperti menu pembayaran dan lain-lain, efisiensi aplikasi ini cukup dikarenakan masih belum massif dan menyeluruhnya sosialisasi aplikasi, kecukupan program ini cukup menyelesaikan masalah jika pengguna aplikasi sudah mencapai target yang di tentukan namun sayangnya belum mencapai target, perataan program ini belum menyeluruh dikarenakan sosialisasi dan pendampingan yang belum massif, responsifitas dari program ini cukup karena banyak menu yang harus di buat otomatis agar pengguna lebih banyak dan nyaman, ketepatan program ini tentu tepat dikarenakan era digital seperti saat ini. Diharapkan pemerintah terus fokus dalam pengembangan aplikasi ini seperti massif dan menyeluruh dalam sosialisasi terus melakukan *maintenance* agar semakin mudah aplikasi ini digunakan serta di damping dengan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM di kabupaten lampung tengah khususnya dan pada para pengguna dan calon pengguna aplikasi pada umumnya agar tujuan maju dan berkembangnya UMKM Kabupaten Lampung Tengah dapat tercapai.

**Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Tol, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF COOPERATIVES AND SMES IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY IN OVERCOMING THE IMPACT OF TOLL ROADS (Study on SMEs in Yukum Jaya Village)**

**By :  
Yopi Pradana**

*The inauguration of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) for the Bakauheni-Terbanggi Besar section on Friday, March 8, 2019, made traffic rates more effective. The 143-kilometer-long toll road makes most of the vehicles that get off the ship at the Bakauheni port directly enter the toll road. Of course this has many positive and negative impacts. The positive impact is that the traffic rate is smoother and more effective. One of the negative impacts of the construction of the Bakauheni-Terbanggi Besar toll road is the decline in the income of the community's Small and Medium Enterprises, one of which is on the Central Sumatran highway. The decrease in income was due to a decrease in the volume of passing vehicles. Therefore, the Central Lampung District Government through the Lampung District Cooperative and Small and Medium Enterprises Service is launching the UMKM Berjaya Application program. A digital application that can bring together sellers and buyers and proceed with transactions. Of course, the aim of this program is to improve the people's economy, in this case, Small and Medium Enterprises in Central Lampung Regency, especially Yukum Jaya Village or those affected by toll roads. This program is evaluated using policy evaluation theory by William Dunn. The effectiveness of this application is quite effective but there are still many things that need to be added and improved such as payment menus and others, the efficiency of this application is sufficient because it is still not massive and comprehensive socialization of the application, the adequacy of this program is enough to solve the problem if the application user has reached the target set but unfortunately it has not reached the target, this program alignment has not been comprehensive due to the lack of massive socialization and assistance, the responsiveness of this program is sufficient because many menus must be created automatically so that more and more users are comfortable, the accuracy of this program is certainly right because of the digital era like today . It is hoped that the government will continue to focus on developing this application, such as massive and thorough socialization, continuing to carry out maintenance so that it is easier for this application to be used and accompanied by guidance and training for Small and Medium Enterprises in Central Lampung district in particular and on users and prospective application users in general so that goals are advanced. and the development of Small and Medium Enterprises in Central Lampung Regency can be achieved.*

**Keywords: Policy Evaluation, Toll Road, Micro, Small and Medium Enterprises**

**STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH DALAM MENGATASI DAMPAK JALAN TOL  
(Studi UMKM Kelurahan Yukum Jaya)**

Oleh :

*Yopi Pradana*

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **STRATEGI DINAS KOPERASI DAN  
UMKM KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH DALAM MENGATASI  
DAMPAK JALAN TOL (Studi UMKM  
Kelurahan Yukum Jaya)**

Nama Mahasiswa : **Yopi Prađana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516021120**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Feni Rosalia, M. Si**  
NIP. 196902 199403 2 001

**Dr. Nur Efendi, M.Si**  
NIP. 19691012 199512 1 001

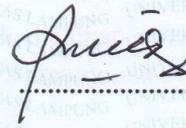
**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

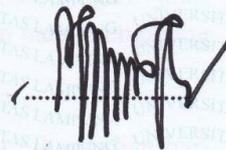
**Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



**Sekretaris : Dr. Nur Efendi, M.Si.**



**Penguji : Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Februari 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 April 2022  
Yang Membuat Pernyataan



**Yopi Pradana**  
NPM. 1516021120

## RIWAYAT HIDUP



Yopi Pradana adalah nama penulis. Penulis lahir pada 22 April Tahun 1997 di Kabupaten Lampung Tengah. Lahir dari orang tua yakni ibu Siti Marwiyah dan ayah Sartim. Penulis ditakdirkan lahir sebagai anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Sulusuban pada Tahun 2004, dan kemudian lulus pada Tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seputih Agung pada Tahun 2009 dan lulus pada Tahun 2012. Pada tingkatan Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Agung pada Tahun 2012 dan lulus pada Tahun 2015.

Pada Tahun 2015 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, melalui jalur SBMPTN. Penulis merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi. Pada saat perkuliahan penulis aktif dalam menjadi asisten dosen beberapa mata kuliah yaitu Pendidikan Agama Islam, Etika Politik, dan Filsafat Ilmu. Penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa KOIN (Komunitas Integritas). Penulis menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Sejak dari pertengahan masa perkuliahan penulis aktif bekerja di CV. Lampung Cerdas sampai saat ini menjadi PT. Lampung Cerdas Mendunia.

## *Motto*

*Semua Progres Berada diluar Zona Nyaman  
Maka Perluaslah Zona nyaman bukan keluar  
(Michael John Bobak)*

*Kegagalan Itu Tidak Pernah Ada Kecuali  
Anda Berhenti Bergerak  
(Mardigu Wowiek P)*

*Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi  
manusia lain.  
(Yopi Pradana)*

# *Persembahan*

Ku Persembahkan Karya ini  
Kepada

Kedua orang tuaku tercinta atas segala pengorbanannya disertai do'a yang tulus dan tiada henti untuk segala urusanku dan keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.

Kedua adikku yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungannya yang tiada henti selama ini.

Seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat rahmat Allah SWT, karena atas karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul “ **Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mengatasi Dampak Jalan Tol (Studi UMKM Kelurahan Yukum Jaya)** “ ini dibuat sebagai penelitian akhir dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Proses belajar yang dirasakan oleh penulis selama belajar di perkuliahan dirasakan sangat berharga dan mendalam, baik dalam pelajaran tentang mata perkuliahan maupun pelajaran hidup yang penulis dapatkan. Oleh karena dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas nikmat yang diberikan.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung beserta jajaran.
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.I.P Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung dan jajaran.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan fikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nur Effendi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing dan membantu penulis yang notabene berbeda jurusan namun terus di bombing dengan baik.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dan pelajaran hidup yang sangat berarti.

7. Orang-orang terkasihku, kedua orang tuaku Bapak Sartim dan Ibu Siti Marwiyah, serta kedua adikku Shella Amelia dan Farel Danish Al Aziz keluarga besar yang saya sayangi, serta Vebriyana yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang penuh serta memberikan doa, dukungan dan motivasi selama penyelesaian kuliah penulis;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
9. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah dan jajaran
10. Para informan pelaku UMKM di Kelurahan Yukum Jaya dan Kasi Kesra Kelurahan Yukum Jaya.
11. Keluarga besar Lampung Cerdas Bang Syaifulloh, Uda, Bang Madian, Mas Daus, Mba ade, Mba peni, mba elok, rere, restu, khumaira, nita, atul, shafira, Mas Jefri, amirul, firli, reza, sanda, ilham, dan semuanya.
12. Teman-teman superku Ahmad Rosikin, Edi arief Effendi, Raka widharma Kartika. Dan rekan rekan yang lain
13. Teman-teman seperjuanganku Pascal, Ikhsan, Rahmat, Intan, Dara, Ellen, Annisa, Widya, Dila, Diska, Aca, Feygy, dan teman-teman yang lain, terimakasih atas waktu, kesempatan, dan sarannya
14. Keluarga besar Ilmu Pemerintahan 2015, adik-adik 2016, 2017 dan 2018, serta abang mba yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah memberikan dukungan dan pengalamannya untuk penulis;
15. Almamater tercinta dan seluruh pihak yang telah membantu selama pembuatan laporan penelitian ini yang tidak bias penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis meminta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Bandar Lampung, 15 Juni 2022  
Penulis,

**Yopi Pradana**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Strategi .....	9
B. Evaluasi Kebijakan .....	15
C. Tinjauan Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) .....	25
D. Tinjauan Tentang Jalan Tol .....	29
E. Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data.....	38
F. Teknik Keabsahan Data.....	40

**IV. GAMBARAN UMUM**

A. Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar .....	42
B. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) .....	45
C. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah .....	47
D. Kelurahan Yukum Jaya .....	50

**V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Efisiensi .....	54
B. Kecukupan .....	63
C. Perataan .....	66
D. Responsifitas.....	68
E. Ketepatan .....	70

**VI. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	73
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar.2 Struktur Organisasi Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah .....	46
Gambar.3 Tampilan Aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah).....	52

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1 Presentase Penurunan Pendapatan UMKM di Kelurahan Yukum Jaya ..	6
Tabel.2 Kriteria Evaluasi Menurut William Dunn .....	19
Tabel.3 Rincian Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar .....	42
Tabel.4 Ketersediaan Rest Area di Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar .....	43
Tabel.5 Daftar Lurah/Kepala Desa yang pernah menjabat di Kelurahan Yukum Jaya.....	48
Tabel.6 Topografi Kelurahan Yukum Jaya.....	48

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Infrastruktur adalah salah satu aspek yang dapat menjadi indikator ukur kemajuan suatu Negara. Salah satu bentuk infrastruktur yang saat ini sedang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan jalan tol. Selain dapat menjadi indikator kemajuan suatu negara industri jalan tol bisa juga dijadikan sebagai bukti dan kesiapan sebuah negara dalam menyongsong sebuah peradaban yang serba mudah dan serba cepat dalam setiap melakukan aktivitas.

Infrastruktur jalan tol ikut mengambil peran dalam mendukung ekonomi, sosial, budaya, kesatuan dan persatuan masyarakat dalam hal berinteraksi, serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Infrastruktur jalan tol juga merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen. Seperti yang terjadi di provinsi papua, jalan tol trans papua yang ditargetkan tahun ini tersambung seluruhnya. Hadirnya jalan tol ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karna harga kebutuhan pokok termasuk BBM kini sudah turun. seperti menurut menteri Basuki Hadimuljono dalam okezone selasa 15 januari 2019, "masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua".

Kemudahan transportasi melalui tol sudah dapat dirasakan masyarakat secara nyata. Dalam perkembangannya pembangunan jalan tol memang masih terpusat di kota-kota besar seperti pulau Jawa (Jawa Sentris). Namun seiring berjalannya waktu pemerintah berusaha agar jalan tol dapat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah guna mendukung pemerataan di Indonesia. Proyek tol yang dibangun pemerintah saat ini pun tidak main-main bisa dilihat seperti mega proyek tol Trans Sumatra, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua. Salah satu jalan tol yang masih dalam tahap pembangunan pada saat ini adalah jalan tol lintas Sumatra. Jalan tol tersebut akan dibangun sejauh 2600 kilometer, dimulai dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Aceh. Pada tahap pertama, pengerjaan jalan tol dimulai dari ruas jalan tol Bakauheni sampai Terbanggi Besar (sepanjang 140,938 kilometer). Ruas tol Bakauheni sampai Terbanggi Besar kini sudah selesai dibangun dan diresmikan pada Jumat 8 Maret 2019.

Kemajuan suatu bangsa bisa dilihat dari seberapa kuat perekonomiannya, kekuatan ekonomi suatu bangsa bisa dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan jalan tol bisa membuat perekonomian kuat karena lebih cepat dalam melakukan distribusi, mobilitasi dan lain sebagainya. Namun dari pada itu hadirnya jalan tol juga dapat berdampak sebaliknya jika tidak dilakukan mitigasi dengan baik.

Perkembangan tol di Indonesia menuai beberapa pro dan kontra dari masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap bahwa hadirnya jalan tol ini perlu dan penting. Jalan tol dinilai dapat mempercepat laju distribusi barang

ke daerah dan sebaliknya, menunjang pemerataan barupa barang dan harga antara kota dan desa atau pusat dan daerah, mempercepat laju transportasi, Sebaliknya ada juga masyarakat yang menganggap belum saatnya tol dibangun, dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan kesiapan pemerintah. Belum siapnya aspek ekonomi kurangnya anggaran APBN untuk membangun jalan tol membuat pembangunan ini terkesan dipaksakan karena tetap harus hutan. sosial budaya seperti yang dikutip pada harian Kompasiana 18 April 2018, kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar sangat berbeda dari sebelum adanya tol mulai dari kebisingan yang bersumber dari kendaraan di tol yang membuat masyarakat tidak nyaman, polusi semakin meningkat, sampai kegiatan masyarakat yang terganggu karena akses jalan terpotong oleh jalan tol, dan jarak yang jauh untuk memutar. selanjutnya adalah melihat pemerintah yang belum siap dan terkesan memaksakan.

Hal ini dibuktikan dari tanggapan menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang dikutip dari harian *detikfinance* pada 19 Februari 2019, yang mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan pedagang di jalur Cikampek Cirebon dikarenakan volume kendaraan yang menurun hingga 70% ia juga menuturkan bahwa permasalahan ini harus dijadikan pembelajaran sendiri bagi pemerintah setempat.

Wakil presiden Jusuf Kalla melalui berita satu 25 Oktober 2017 mengaku telah memperingatkan perihal penurunan pendapatan masyarakat dampak dari banyaknya pembangunan jalan tol. Peringatan tersebut, termasuk ketika

pemerintah hendak membangun jalan tol padang-pekanbaru. "Saya ya sudah peringatkan hati-hati buat jalan tol di sana (Sumatera barat). Karena kalau jalan tol itu, mati semua daerah di sekitarnya, daerah pinggirannya. Kata JK saat memberikan arahan kepada peserta *young economic stand up* di istana Jakarta Rabu (25/10). Jika mencontohkan bagaimana pedagang kecil dan penjual cenderamata yang bangkrut karena adanya jalan tol ke Bogor. Untuk itu, sarannya lebih baik membuat jalan yang lebar dan bagus dibandingkan membangun jalan tol, guna menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar. Walaupun diakuinya kebijakan pemerintah pusat mengenai jalan tol memang memiliki resiko seperti penurunan pendapatan UMKM yang terdapat di jalan raya atau non tol.

Akibatnya pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan ini secara langsung haruslah responsif dan solutif terhadap permasalahan ini. Seperti yang ditulis pada harian [republika.co.id](http://republika.co.id) pada Sabtu 1 Juli 2017 yang menyatakan bahwa gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar *rest area* jalan tol yang ada di Jawa tengah diisi oleh UMKM lokal agar mereka bisa menjajakan produknya di rest area. Ganjar mengungkapkan bahwa pembangunan jalan tol secara masif di provinsi Jawa tengah berdampak menurunnya omset pedagang oleh-oleh maupun cenderamata di sejumlah titik.

Ganjar menyebutkan jika para pedagang batik dan telur asin di sepanjang jalur pantai utara mengeluhkan omzetnya menurun akibat pembangunan jalan tol pematang-samarang. "Kalau para pedagang diizinkan berjualan di

*rest area* jalan tol dengan harga sewa yang tidak terlalu mahal, diharapkan akan menaikkan omset masing-masing." Ujarnya. Menurut dia, pemerintah daerah harus menerbitkan regulasi yang mengatur alokasi *rest area* jalan tol untuk para pedagang berskala kecil. "Semisal kita atur pakai regulasi 30% kios di *rest area* untuk pedagang kecil dan UMKM kan bisa, sewanya juga tidak mahal "selain itu, kata Ganjar, *rest area* jalan tol harus didisain seindah mungkin agar tidak hanya digunakan untuk beristirahat bagi pengguna jalan, melainkan juga bisa sebagai tujuan alternatif pariwisata. Solusi seperti inilah yang seharusnya dapat menjadi pemicu kreativitas pemerintah daerah lainnya baik pemerintah daerah maupun provinsi agar dapat menangani masalah serupa dengan solusi yang sama atau solusi yang lainnya.

Aktifnya ruas tol bakauheni-terbanggi besar menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah terkait, seperti pemerintah daerah Lampung Tengah yang harus serius dalam menangani permasalahan ini, karena bandar jaya sebagai pusat perekonomian Lampung Tengah turut terlintasi jalan tol tersebut. Hal ini ditambah lagi ada dua pintu tol diantara Bandar Jaya, tepatnya di kelurahan Seputih jaya, kecamatan Gunung Sugih, dan pintu tolTerbanggi Besar. Tentu banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti yang terjadi di wilayah lain sebelumnya, seperti penurunan pendapatan bahkan bisa terjadi kebangkrutan, serta peningkatan angka pengangguran.

Dampak peresmian jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar langsung dirasakan oleh masyarakat kelurahan Yukum Jaya terutama yang memiliki

usaha di sekitar jalan Lintas Sumatera. Dampak yang ditimbulkan ini pun seragam yakni penurunan pendapatan yang dikarenakan *traffic* jalan lintas Sumatera yang kini sepi. Padahal mayoritas konsumen masyarakat yang memiliki usaha tersebut mayoritas adalah pengguna jalan titik baik dalam maupun luar kota dan memang didominasi oleh orang-orang dari luar kota yang melintas.

Berikut data yang di dapat dari hasil wawancara yang di lakukan dengan kepala seksi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Yukum Jaya:

No	Poin Analisis	Jumlah
1	Jumlah UMKM	176
2	UMKM Terdampak	123
3	Range Persentase Penurunan Pendapatan	30-80%

Selain data di atas juga di ketahui ada UMKM yang bahkan sampai memangkas karyawannya karena omzet tidak cukup untuk gaji karyawan. Hal ini bersumber langsung dari penanggung jawab Rumah Makan Prambanan dimana beliau menuturkan warung yang biasanya buka 24 jam kini jam 9 malam sudah tutup. Bahkan ketika awal awal tol di resmikan warung sempat tutup selama 2 bulan, dan kini karyawan hanya tinggal 7 orang yang awalnya 15 orang. Dalam kasus lain juga terjadi hal serupa bahkan kali ini UMKM tersebut telah tutup yakni Rumah Makan Andes dimana warung makan khas Masakan Padang itu kini sudah Gulung Tikar hingga pemilik memutuskan untuk alih usaha menjadi produk dan jasa pemasangan Plafon. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus agar kekuatan perekonomian masyarakat Lampung Tengah dapat terus tumbuh dan menjadi daerah otonom yang mandiri.

Penelitian mengenai dampak pembangunan jalan tol memang menarik untuk dikaji, seperti beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis yakni, penelitian yang dilakukan oleh Egy Loveyan jaya dari jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang berjudul "Dampak Pembangunan Jalan tol Bakauheni- Terbanggi besar terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk sekitar gerbang tol di Kelurahan Korpri Raya, Bandar Lampung ". Begitu juga yang dikutip pada skripsi Muhammad ikrom Rasyidin dari Universitas Islam Negeri Jakarta yang berjudul "Dampak Pembangunan tol Cikopo-Palimanan terhadap kondisi mata pencaharian dan pendapatan masyarakat desa Tegal Karang Palimanan Cirebon".

Penelitian ini penting dilakukan sebagai langkah untuk mengembalikan keadaan UMKM masyarakat Lampung tengah, khususnya Kelurahan Yukum Jaya yang terkena dampak dari diresmikannya jalan tol Trans Sumatera. Selain itu juga penelitian ini penting dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran karena memang sudah banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya dan beberapa UMKM bahkan bangkrut dan tutup. Oleh karena itu kebijakan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah kabupaten Lampung tengah dan strategi apa yang akan dilakukan agar jalan tol yang melintasi kabupaten Lampung tengah tidak berdampak buruk namun malah sebaliknya.

Strategi dipilih karena belum adanya kebijakan yang diresmikan oleh pemerintah sekaligus untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah menjadi prioritas untuk diselesaikan titik karena melihat dampak yang

ditimbulkan permasalahan ini penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah terkait.

Maka penulis menetapkan judul penelitian yaitu "Strategi Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mengatasi Dampak Peresmian Jalan tol" yang dalam hal ini studi pada UMKM kelurahan Yukum Jaya sebagai objek yang terkena dampak.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Strategi Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi dampak jalan tol ?

## **C. Tujuan**

Untuk Mengetahui Strategi Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi dampak jalan tol

## **D. Manfaat**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan strategi Pemerintah menghadapi dampak jalan tol.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan Dapat menjadi masukan bagi Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lampung Tengah dalam menentukan strategi dalam menghadapi mengatasi dampak jalan tol.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Strategi

#### 1. Pengertian Strategi

Pengertian “strategi” bersumber dari kata Yunani klasik, yakni “*strategos*” (jenderal), yang ada pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*strategos*” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki (Bracker dalam Heene, dkk. 2010:53).

Sedangkan Itami dalam Kuncoro (2006:2) mendefinisikan strategi sebagai penentuan kerangka kerja dari aktivitas organisasi/perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengoordinasikan aktivitas, sehingga organisasi/perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak diinginkan.

Hal senada disampaikan Djatmiko (2008:4) yang mengatakan bahwa strategimerupakan suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Berdasarkan padadefenisi tersebut, terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting padastrategi, yaitu lingkungan eksternal, sumberdaya dan kemampuan internal, sertatujuan yang akan dicapai. Intinya, suatu strategi organisasi memberikan dasar-dasar pemahaman tentang bagaimana organisasi itu akan bersaing dan survive.

Menurut Effendy (2004:300) strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Di dalam penggunaan strategi, ada yang disebut denganmanajemen stratgeis (*strategic management*) yang merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif.

Berdasarkan pengertian startegi yang dipaparkan oleh para ahli tersebut, dapatdikatakan bahwa strategi ialah suatu cara yang dilaksanakan organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi/perusahaan melihat ancaman, peluang, dan kemampuan organisasi.

## 2. Tipe Strategi

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu.

Menurut Kotler dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru
- b. *Program Strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu.
- c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

## 3. Manajemen Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Dalam strategi terdapat suatu manajemen untuk melaksanakan strategis tersebut yang disebut dengan manajemen strategis. Menurut Siagian (2007:15), manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh seluruh

jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Sementara itu Viljoen dalam Heene (2010:76) mengutarakan sebuah penafsiran yang sangat rinci dengan mengasumsikan bahwa manajemen strategis adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari organisasi, melalui penentuan arah disertai melanjutkan komitmen ataupun penyesuaian antara keterampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut puladengan lingkungan yang evolutif di mana organisasi itu beroperasi.

Menurut Houthoofd dalam Heene (2010:76) manajemen strategis didefinisikan sebagai suatu proses di mana organisasi menata diri demi tercapainya tujuan-tujuan keorganisasian melalui cara:

- a. Analisis strategi yang proporsional
- b. Perumusan strategi yang dijadikan keunggulannya
- c. Pengimplementasian strategi yang akurat; dan
- d. Pengevaluasian kontinum terhadap kinerjanya.

#### 4. Manfaat Manajemen Strategi

Setiap strategi yang direncanakan suatu organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh David (2002:15) bahwa tujuan dari strategi adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan dengan menggunakan

pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada tersedianya pilihan-pilihan strategis.

Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (1997:30-31) strategi berfungsi untuk:

- a. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan organisasi mencegah masalah. Manajer yang mendorong bawahannya untuk menaruh perhatian pada perencanaan dibantu dalam melaksanakan tanggungjawab pemantauan dan peramalan oleh bawahan yang menyadari perlunya perencanaan strategik.
- b. Keputusan strategik yang didasarkan pada kelompok mungkin sekaligus dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang lebih baik karena interaksi kelompok menghasilkan strategi yang lebih beragam dan karena peramalan yang didasarkan pada bermacam-macam spesialisasi anggota kelompok meningkatkan kemampuan menyaring pilihan.
- c. Keterlibatan anggota dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalance di setiap rencana strategik dan dengan demikian mempertinggi motivasi mereka.
- d. Senjang dan tumpang tindih kegiatan di antara individu dan kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing.

- e. Penolakan terhadap perubahan berkurang. Meskipun para peserta dalam perumusan strategi mungkin tidak lebih senang dengan keputusan mereka sendiri ketimbang jika keputusan diambil secara otoriter, kesadaran mereka yang lebih besar akan parameter-parameter yang membatasi pilihan membuat mereka lebih mau menerima keputusan ini.

## 5. Tahapan Manajemen Strategi

David (2002:3) mengatakan proses strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu:

### a. Perumusan

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam suatu proses kegiatan. Teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi kerangka kerja diantaranya:

b. Tahap input (masukan)

Dalam tahap ini proses yang dilakukan adalah meringkas informasi sebagai masukan awal, dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi.

c. Tahap pencocokan

Proses yang dilakukan adalah memfokuskan pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor-faktor eksternal dan internal. Tahap keputusan menggunakan satu macam teknik setelah diperoleh dari input sasaran dalam mengevaluasi strategi alternatif yang telah diidentifikasi dalam tahap dua.

## **B. Evaluasi Kebijakan**

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang teori-teori dan definisi yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan agar dapat melihat realita yang terjadi, apakah sesuai dengan dalil-dalil teori serta diperlukan uraian batas konsep peneliti guna membahas lebih lanjut. Adapun teori atau definisi yang dijadikan acuan pada penelitian antaralain:

### **1. Kebijakan Publik**

Membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Publik tidak luput dari adanya Kebijakan publik itu sendiri, peneliti akan menjelaskan tentang Kebijakan Publik dalam penegertiannya. Kebijakan Publik adalah salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus bisa berkerjasama

dengan masyarakat agar dapat menjalankan Kebijakan Publik tersebut sesuai dengan peraturan dan mendapat tujuan yang diinginkan. Seperti halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut<sup>1</sup>.

Menurut Samodra Wibawa (1994: 50), kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci:

- a. Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan.
- b. Lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan bukannya orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua termasuk dalam kota pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk kepada bidang-bidang kehidupan

masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan.

- c. Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebijakan akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Untuk mengetahui penyebab kegagalan. Dalam mencapai tujuan serta untuk mengantisipasi kegagalan yang sama dimasa mendatang, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan.

## 2. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William Dunn, evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membandingkan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut.

### a. Fokus nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran

it sendiri. Interdependensi fakta nilai Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil- hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

b. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluasi berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi- aksi dilakukan.

a. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai interistik (diperlukan bagi dirinya) atau eksteristik (diperlukan Karena hal itu mempengaruhi tujuan lain).

---

<sup>1</sup>Solichin Abdul Wahab, 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 4.

Nilai yang sering didata didalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.<sup>3</sup>

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn diatas menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apa bila ada aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu dari berbagai teori diatas, dipilihlah teori William Dunn dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria evaluasi diperlukan dalam menjalankan evaluasi kebijakan, dalam hal ini dikaitkan karena dalam pelaksanaan teori tersebut diperlukan dua hal yakni kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk di rekomendasikan. Kriteria rekomendasi sendiri diterapkan untuk diaplikasikan kriteria untuk evaluasi diterapkan secara restrospektif sedangkan kriteria untuk rekomendasi di terapkan secara prospektif

---

<sup>3</sup> William N Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, hlm.608.

**Tabel Kriteria Evaluasi Menurut William Dunn**

<b>TIPE KRITERIA</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>ILUSTRASI</b>
<b>Efektivitas</b>	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelaksana
<b>Efisiensi</b>	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit perencanaan dan kolaborasi dengan unit pelaksana
<b>Kecukupan</b>	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Pencapaian Strategi yang di laksanakan
<b>Perataan</b>	Apakah sudah mencakup minimal target pengguna dan berbagai wilayah	Kriteria pareto
<b>Responsifitas</b>	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok- kelompok tertentu?	Kosistensi dengan survey UMKM
<b>Ketepatan</b>	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisiensi

Berdasarkan tabel kriteria Evaluasi Kebijakan Pulik diatas, peneliti menemukan kriteria yang sesuai dengan judul penelitian, yakni Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah dalam Mengatasi dampak Jalan Tol apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan atau belum tercapainya hasil dari kinerja suatu instansi tersebut

Oleh karena itu peneliti mengambil Strategi sebagai topik penelitian awal yang kemudian dapat di kombinasikan dengan Evaluasi Kebijakan terkait dengan Strategi yang sudah di lakukan.

a. Pendekatan Terhadap Evaluasi

Evaluasi memiliki hubungan erat yang berkaitan dengan beberapa macam metode sebagai bentuk penilaian kebijakn publik, atau penentuan hasil kegunaan dari beberapa orang, kelompok, dan masyarakat. Karena hal tersebut saling berhubungan maka dapat ditemukannya fakta dan premis-premis nilai yang menuntut adanya evaluatif. Dalam penentuan hal tersebut evaluasi memiliki beberapa cara yang terkait dalam penyelesaian dan sering disebut dengan pendekatan evaluasi untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan”.

Karena kurangnya penjelasan arti mengenai evaluasi di dalam analisis kebijakan, maka menjadi sangat penting dalam membedakan pendekatan dalam beberapa evaluasi kebijakan yaitu:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tetang hasil keijakan, ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendrinya atau tidak kontrovesional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.615

## 2. Evaluasi Formal

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.<sup>6</sup> Dalam analisis evaluasi formal dapat menggunakan beberapa metode yang dipakai dalam evaluasi semu dengan tujuan yang identik yakni menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya hasil maupun dampak kebijakan sehingga mampu dilacak dan dijadikan masukan dalam proses kebijakan. Dalam hal ini sering pula ditemukan perbedaan dalam menggunakan evaluasi formal seperti wawancara, dokumen-dokumen program, dan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan administrator sehingga sesuai dengan spesifikasi tujuan dan target kebijakan.

## 3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.<sup>7</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan diantara evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis, karena dalam mengambil evaluasi keputusan teoritis dalam memunculkan suatu tujuan dan target yang akan membawa pelaku kebijakan kepada hal yang disembunyikan atau dapat dinyatakan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.613.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.613

Tujuan dari evaluasi keputusan teoritis sendiri mampu menghubungkan informasi mengenai hasil dan nilai kebijakan dari pelaku kebijakan.

b. Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan yang perlu untuk dievaluasi. William Dunn (1998) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting diantaranya :

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang

pada definisi alternatif baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan telah ada perlu diganti atau diperbarui.

4. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
5. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
6. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya. Termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan telah ada perlu diganti atau diperbarui.

### C. Tinjauan tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)

#### 1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM di definisikan sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 11 dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 6. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan Maksimal Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 2.000.000.000 sampai Rp. 15.000.000.000 (dua milyar rupiah sampai lima belas milyar rupiah), serta Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 15.000.000.000 sampai 50.000.000.000 (lima belas milyar rupiah sampai lima puluh milyar rupiah)

## 2. Kelebihan dan Kelemahan UMKM

Pada kenyataannya, UMKM mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi Usaha Kecil di Indonesia mampu berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Menurut Harimurti (2009), secara umum perusahaanskala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan antara lain seperti :

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti *marketing* , *finance* dan administrasi).
2. Perusahaan keluarga, dimana pengelolaanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
3. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
4. Resiko usaha menjadi beban pemilik.
5. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur.
6. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
7. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasajasanya.
8. Prosedur hukumnya sederhana.
9. Pajak relatif ringan.
10. Kontak – kontak dengan pihak luar bersifat pribadi.
11. Mudah dalam proses pendiriannya.
12. Mudah di bubarkan setiap saat jika dikehendaki.
13. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
14. Pemilik menerima seluruh laba.
15. Umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk survive.

16. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
17. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha kecil di Indonesia.
18. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola.
19. Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang tidak terlalu mahal.
20. Meskipun tidak terlihat nyata, masing-masing usaha kecil dengan usaha kecil yang lain saling ketergantungan secara moral dan semangat berusaha.

#### **D. Tinjauan tentang Jalan TOL (*Tax On Location*)**

##### 1. Pengertian Jalan TOL

Jalan Tol (*Tax On Location*) adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai rasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Sedangkan tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pengguna jalan tol (UU No.38/2004).

Dalam pasal 43 (UU No.38/2004), jalan tol diselenggarakan untuk :

- a. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.
- b. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- c. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.
- d. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Pengguna tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan tol.

Keberadaan jalan tol diharapkan secara langsung dapat mengurangi beban lalu lintas, kemacetan yang terjadi di jalan umum dan mengurangi polusi udara akibat kendaraan berjalan lambat atau macet. Jalan tol memiliki peran strategis baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan maupun untuk pengembangan wilayah. Pada wilayah yang tingkat perekonomiannya telah maju, mobilitas orang dan barang umumnya sangat tinggi sehingga dituntut adanya sarana perhubungan

darat atau jalan dengan mutu yang andal. Tanpa adanya jalan dengan kapasitas cukup dan mutu yang andal, maka dipastikan lalu lintas orang maupun barang akan mengalami hambatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi

## 2. Karakteristik Penyelenggaraan Jalan Tol

Pernyataan ini disusun dengan memperhatikan sifat dan karakteristik penyelenggaraan jalan tol di Indonesia dan berpedoman pada konsep dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Karakteristik pokok penyelenggaraan jalan tol diantaranya adalah:

- a. Keberadaan jalan tol dan pengusahaannya diatur berdasarkan undang-undang. Berdasarkan peraturan yang berlaku, kepemilikan dan hak penyelenggaraan jalan tol ada pada pemerintah. Pemerintah selain menanggung biaya pengadaan tanah juga dapat memberikan wewenang kepada suatu badan usaha negara untuk menyelenggarakan jalan tol yang mencakup kegiatan membangun, memelihara dan mengoperasikan. Badan usaha negara yang diberi wewenang penyelenggaraan jalan tol, atas persetujuan pemerintah, boleh bekerja sama dengan Investor baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam penyelenggaraan jalan tol.
- b. Jalan tol memiliki mutu yang andal, bebas hambatan dan pemakai jalan tol wajib membayar tol. Secara umum jalan tol memiliki keandalan teknik yang tinggi. Jika jalan tol dipelihara dan diperbaiki sebagaimana mestinya, maka jalan tol akan

berfungsi dan memiliki umur teknis yang sangat panjang. Pemeliharaan dan perbaikan periodik diperlukan atas badan jalan tol, misalnya pelapisan ulang pada pavement atau penggantian beberapa komponen dalam jembatan tol yang mengalami proses keausan.

- c. Pengadaan jalan tol sangat terkait dengan program pengembangan jaringan jalan nasional, dan mendorong pengembangan wilayah di sekitar jalan tol. Dalam pembangunan dan pengoperasian jalan tol tidak tertutup kemungkinan adanya tuntutan lingkungan terhadap Penyelenggara jalan tol, untuk mengembangkan jaringan jalan bukan tol, bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. tuntutan lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap pengoperasian jalan tol sebagai jalan alternatif.

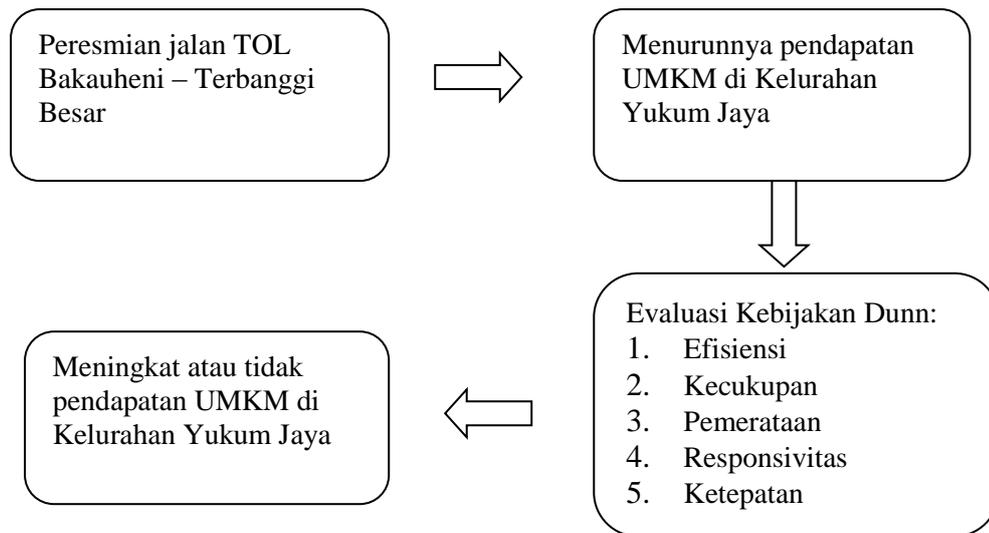
Proyek-proyek infrastruktur dibandingkan proyek gedung atau proyek lainnya, khususnya pembangunan jalan tol memerlukan investasi besar dengan masa konstruksi yang sangat panjang. Konsekuensinya, proyek semacam ini mempunyai risiko tinggi pada masa konstruksi, yang antara lain ditunjukkan dengan makin lamanya waktu yang diperlukan dalam penyelesaian konstruksi. Akibatnya, biaya yang diperlukan semakin membengkak/cost-overruns. Selain itu Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang, pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi

kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol dan badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol (<http://www.bpjt.net>).

#### **E. Kerangka Pikir**

Peresmian jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas bakauheni-terbanggi besarpada jumat 8 maret 2019 menjadikan laju lalu lintas lebih efektif. Jalan TOLsepanjang 143 kilometer itu membuat banyak kendaraan yang turun dari kapaldi pelabuhan bakauheni sebagian besar langsung masuk ke jalan TOL. Begitupula sebaliknya, sebagian besar kendaraan dari arah sebaliknya langsungmasuk TOL melalui pintu TOL terbanggi besar. Tentu hal ini banyak menimbulkan banyak dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya memang laju lalu lintas lebih lancar dan efektif. Salah satu dampknegatif pembangunan jalan TOL Bakauheni-Terbanggi Besar adalah menurunnya pendapatan UMKM masyarakat salah satunyayang ada dijalan lintas tengah sumatra, sebagai contoh UMKM di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Menurunnya pendapatan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah. Karena selain dapat mengakibatkan pelaku usaha bangkrut dan kesejahteraannya menurun, jugabisa berdampak bagi karyawan yang bisa saja diberhentikan yang kemudian semakin meningkatkan angka pengangguran.

Demi mencegah hal buruk itu terjadi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Lampung Tengah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah yang juga sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah harus mempunyai strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Stabilitasnya pendapatan UMKM masyarakat tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiriserta dapat meringankan tugas pemerintah. Dikarenakan sampai hari ini belum adanya kebijakan dari pemerintah daerah Lampung Tengah yang fokus menangani masalah ini maka penelitian ini lebih berfokus pada Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah untuk mengatasi masalah penting ini yang akan penulis analisis dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan 5 kriteria menurut William Dunn (2003), yaitu Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, Kecukupan berkenaan kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal, Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan, Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berikut ini adalah alur pikir peneliti yang digambarkan sebagai berikut :



**Gambar. 3 Kerangka Pikir**

### **III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai deskripsi, gambaran faktual, dan akurasi tentang strategi Pemerintah kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi tantangan perekonomian pasca pembangunan jalan TOL (Tax On Location). Hal ini sesuai dengan pendapat Nazir (2005:55) yang menyatakan bahwa tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga, penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena yang terjadi guna menganalisis strategi Pemerintah kabupaten Lampung Tengah dalam menghadapi tantangan perekonomian pasca pembangunan jalan TOL (Tax On Location).

## **B. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan pembatasan tersebut, peneliti dapat memfokuskan penelitian terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selain itu, fokus penelitian ini juga memiliki peranan yang penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Karena dengan adanya panduan dan arahan dalam penelitian, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Adapun fokus dalam penelitian ini menggunakan proses implementasi menurut Utomo antara lain:

- a. Tantangan perekonomian pasca pembangunan jalan TOL (Tax On Location)
- b. Strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan perekonomian pasca pembangunan jalan TOL (Tax On Location)

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Yukum Jaya, Bandar Jaya sebagai pusat perekonomian Lampung Tengah yang langsung terkena dampak pembangunan jalan TOL yakni pada sektor unit-unit usaha seperti rumah makan dan unit usaha lainnya sebagai tolak ukur tantangan perekonomian yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini Kepala Daerah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri sendiri atau self-report, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Adapun daftar informan yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

NO	Informan
1	Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan dinas koperasi dan UMKM kabupaten Lampung Tengah
2	Pemilik rumah makan Prambanan
3	Pedagang Mie ayam
4	Pedagang Nasi uduk
5	Pedagang pengguna aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah)

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metodewawancara dalam penelitian kualitatif. Studi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

c. Observasi

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki.

## **E. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:338) yang meliputi:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel data, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian

## F. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dikatakan valid atau sah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi :

### a. Credibility (Derajat Kepercayaan)

Derajat kepercayaan mempertunjukkan bahwa hasil-hasil penemuan dapat dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda, Untuk menguji credibility, peneliti melakukan:

#### 1. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara kepada sumber berbeda seperti sumber dokumentasi dan observasi dari berbagai informan yang berbeda, kemudian hasil wawancara dikategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik.

#### 2. Pengecekan Sejawat

Pengecekan sejawat dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat agar hasil penelitian dapat lebih baik.

### 3. Kecukupan Refrensial

Kecukupan refrensial dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan, catatan-catatan, rekaman-rekaman yang berhubungan dengan penelitian untuk menguji kembali penelitian yang ada.

#### b. Transferability (Keteralihan)

Pengujian ini berkaitan dengan sampai mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferbility akan tercapai bila pembaca memperoleh gambaran yang sedemikian jelas. Oleh sebab itu, penelitian akan menyajikan laporan yang sedemikian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

#### c. Dependability (Kebergantungan)

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian dependanbility dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

#### d. Conformability (Kepastian)

Uji kepastian dilakukan dengan mengadakan seminar yang dihadiri oleh rekan sejawat beserta pembimbing. Uji kepastian dilakukan untuk melihat apakah data hasil laporan bersifat objektif atau tidak. Objektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan.

## IV GAMBARAN UMUM

### A. Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar

Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar atau Jalan Tol Bakter adalah jalan tol sepanjang 140,94 kilometer yang merupakan ruas tol terpanjang kedua di Indonesia yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Kabupaten Lampung Tengah).<sup>1</sup> Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Tol Trans Sumatra.

Jalan tol dengan total investasi 16,7 triliun ini ditugaskan langsung oleh pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan dari Kementerian BUMN.<sup>2</sup> Jalan tol ini resmi dimulai pembangunannya pada 30 April 2015 dan diresmikan penggunaannya secara penuh pada 8 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

---

<sup>1</sup> Jordan, Ray.” *Jokowi Resmikan Tol Lampung, Terpanjang di Indonesia*”.detik.news. Diakses tanggal 3 September 2021.

<sup>2</sup> “*Presiden Jokowi Hari Ini Awali Pembangunan Tol Trans Sumatra*”.Setkab.go.id, Diakses 12 September 2021

## 1. Sejarah

Jalan tol di Sumatra ini pada awalnya kurang diminati investor sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 100/2014 tentang "Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra" tanggal 17 September 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Utama Karya (Persero) untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada empat ruas jalan tol yang meliputi ruas Jalan Tol Medan-Binjai, ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 117/2015 tentang "Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera" yang menambah penugasan kepada PT Utama Karya (Persero) sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatra. Peletakan batu pertama pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 30 April 2015.<sup>3</sup>

Peresmian penggunaan jalan tol ini dilakukan secara bertahap. Peresmian tahap pertama dilakukan pada 21 Januari 2018 untuk Seksi 1, Segmen Pelabuhan Bakauheni – Simpang Susun Bakauheni sepanjang 8,9 km (bagian dari dari Paket 1 Bakauheni - Sidomulyo), dan Seksi 5, dari Simpang Susun Lematang ke Simpang Susun Kotabaru sepanjang 5,64 km

---

<sup>3</sup> Jordan, Ray." *Jokowi Resmikan Tol Lampung, Terpanjang di Indonesia*". detik.news. Diakses tanggal 3 September 2021.

(bagian dari dari Paket 2 Sidomulyo-Kotabaru).<sup>4</sup>

## 2. Sumber Pendanaan

Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar menggunakan skema penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117/2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas tol ini telah ditandatangani pada 2015. Pada tahun yang sama Pemerintah juga memberikan dukungan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya untuk mendukung PT Hutama Karya memenuhi mandat penugasan ini. Struktur pendanaan ruas ini terdiri atas 45% ekuitas (dipenuhi dengan dukungan PMN) serta 55% pinjaman.<sup>5</sup>

## 3. Pengerjaan Jalan Tol

<b>Rute</b>	<b>Ruas</b>	<b>Panjang</b>	<b>Kontraktor Pelaksana</b>
Seksi 1	Bakauheni-Sidomulyo	39,4 km	PT Pembangunan Perumahan Tbk
Seksi 2	Sidomulyo-Kotabaru	40,6 km	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Seksi 3	Kotabaru-Metro	29 km	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Seksi 4	Metro-Terbanggi Besar	31,93 km	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

<sup>4</sup> Media, Kompas Cyber. "Presiden Jokowi Resmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Terpanjang di Indonesia". *KOMPAS.com*. Diakses tanggal 03 September 2021

<sup>5</sup> Laporan JPIKP Semester I 2019". *Kpip.gp.id* diakses tanggal 20 Oktober 2021

#### 4. Tempat Istirahat

Jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar mempunyai beberapa tempat istirahat untuk arah utara dan selatan. Sementara ada 6 tempat istirahat yang dipersiapkan yaitu:

Lokasi	Arah	Toilet	Masjid/Mushola	SPBU
33+000	Utara	Tersedia	Tersedia	Tersedia
33+000	Selatan	Tersedia	Tersedia	Tersedia
87+650	Utara	Tersedia	Tersedia	Tersedia
87+650	Selatan	Tersedia	Tersedia	Tersedia
116+200	Utara	Tersedia	Tersedia	Tersedia
116+200	Selatan	Tersedia	Tersedia	Tersedia

#### B. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Kelurahan Yukum Jaya yang merupakan perlintasan jalan utama lintas provinsi yang terletak di kabupaten Lampung tengah. Dengan melihat peluang di atas tentu salah satu hal paling efektif dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan berniaga dan inipun yang dilakukan oleh mayoritas warga Yukum Jaya terutama yang yang memiliki lokasi di sepanjang jalan lintas Sumatera.

Klasifikasi usaha masyarakat di Yukum Jaya merupakan UMKM usaha mikro kecil dan menengah di mana hasil penjualan tahunan paling banyak 2 miliar untuk usaha mikro. Hasil penjualan tahunan 2 sampai 15 miliar untuk usaha kecil dan mempunyai hasil penjualan tahunan 15 sampai 50 miliar untuk usaha menengah.

Jumlah UMKM di sepanjang jalan lintas Sumatera di kelurahan Yukum Jaya terdapat 176 UMKM yang lebih dari 75% bergerak atau menjalani usaha kuliner. Jenis usaha kuliner yang tersaji pun berbagai macam mulai dari makanan khas Lampung seperti pindang keripik pisang dan lain-lain hingga kuliner modern seperti makanan cepat saji dan lain-lain.

UMKM di kelurahan Yukum Jaya bertumbuh pesat dikarenakan Bandar jaya yang merupakan kelurahan paling dekat dan sejalur dengan hukum jaya merupakan pusat perekonomian kabupaten Lampung tengah dimana hal ini sangat menguntungkan secara geografis karena populasi dan dan pusat perekonomian yang tinggi di wilayah tersebut sehingga pertumbuhan UMKM pun dapat berjalan dengan baik. Sebanyak 25% lainnya UMKM yang tidak bergerak di usaha kuliner itu bergerak di bidang barang dan jasa seperti bengkel, salon, klinik, aksesoris kendaraan, dan lain lain. Konsumen terbesar dari UMKM kelurahan Yukum Jaya khususnya yang bergerak di bidang dagang merupakan pengguna jalan raya.

Pertumbuhan perekonomian UMKM kelurahan Yukum Jaya terus meningkat hingga Januari tahun 2018. Pertumbuhan ini berhenti dan langsung mengalami penurunan sejak diresmikannya tahap pertama jalan tol lintas

Sumatera sesi 1 yakni bakauheni terbanggi besar. Hal ini berakibat yang mayoritas pendapatan UMKM kelurahan Yukum Jaya didapatkan dari pengguna jalan raya yang merupakan bukan warga masyarakat asli dari Yukum Jaya. Setelah diresmikannya jalan tol mayoritas pengguna jalan raya khususnya roda empat dan seterusnya beralih menggunakan jalan tol karena lebih efektif dan efisien sehingga pendapatan UMKM di kelurahan Yukum Jaya yang di mana letak geografis kelurahan Yukum Jaya tepat di tengah dua pintu tol yakni pintu tol gunung sugih dan pintu tol terbanggi besar. Dari total 176 jumlah UMKM di kelurahan Yukum Jaya ya terdapat 70% UMKM yakni 123 UMKM terdampak langsung oleh peresmian jalan tol trans-sumatera sejak sesi pertama yakni diresmikannya ruas bakauheni-terbanggi besar. Dampak penurunan pendapatan UMKM mulai dari 30% hingga 80% dari pendapatan sebelumnya akibat lanjutnya mulai dari pengurangan tenaga kerja hingga tutupnya usaha tersebut

### **C. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah**

#### **1. Sejarah**

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lampung Tengah merupakan Dinas Type "A", dengan susunan pejabat struktural sbb :

1. Kepala Dinas (Esselon II.b)
2. Sekretaris (esselon III.a)
  - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (esselon IV.a)
  - b. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan (esselon IV.a)
  - c. Kasubbag Keuangan (esselon IV.a)
3. Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi (esselon III.b)
  - a. Kepala Seksi Perizinan (esselon IV.a).
  - b. Kepala Seksi Kelembagaan (esselon IV.a)
  - c. Kepala Seksi Monev, Pelaporan dan Data Koperasi (esselon IV.a)
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (esselon III.b).
  - a. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi (esselon IV.a)
  - b. Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi (esselon IV.a)
  - c. Kepala Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi (esselon IV.a)
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi (esselon III.b)
  - a. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi (esselon IV.a)
  - b. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi (esselon IV.a)
  - c. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi (esselon IV.a).
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (esselon III.b)
  - a. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro (esselon IV.a)
  - b. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro (esselon IV.a).
  - c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan (esselon IV.a)

## 7. Pejabat Pelaksana.

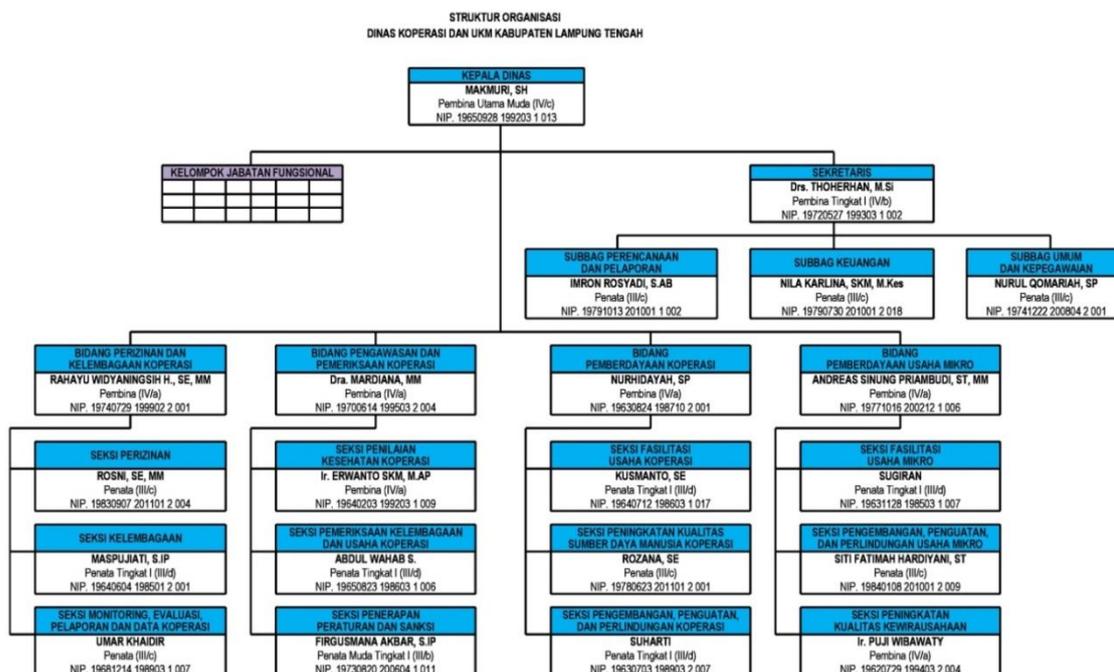
### 2. Visi dan Misi

#### Visi

"Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh, Berdaya Saing Tinggi, Berorientasi Pasar serta Berbasis Sumber Daya Lokal."

#### Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Kemudahan masyarakat dalam berkoperasi.
  2. Meningkatkan Kapasitas Koperasi untuk mengelola potensi ekonomi dan usaha koperasi
  3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM
- ### 3. Struktur Organisasi



#### 4. Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah

Tugas Pokok : "Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM.
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM.
3. Pelaksanaan Pelayanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM.
4. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM.
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **D. Kelurahan Yukum Jaya**

##### 1. Sejarah Singkat Kelurahan Yukum Jaya

Berdasarkan keterangan beberapa penduduk Yukum Jaya nama kelurahan Yukum Jaya digunakan karena dahulu banyak pohon yang bernama pohon Yukum di daerah sekitar, kemudian karena pohon Yukum yang ada di daerah sekitar ini memiliki jumlah yang cukup banyak maka digunakanlah filosofi Jaya yang melambangkan keadaan berlimpah, maka salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar tersebut diberi nama

Yukum Jaya. Kelurahan Yukum Jaya adalah peningkatan status dari kampung Yukum Jaya menjadi Kelurahan Yukum Jaya yang diresmikan oleh Bupati Lampung Tengah pada tanggal 29 Agustus 2003 berdasarkan surat keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 11 Tahun 2003 tentang Peresmian Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan.

Perubahan Kampung Yukum Jaya menjadi Kelurahan Yukum Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 5 tahun 2002 tentang Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan. Kelurahan Yukum Jaya memiliki beberapa Lingkungan, dari beberapa Lingkungan itu masih terbagi lagi ada beberapa RT/RW. Adapun Lingkungan yang ada di Kelurahan Yukum Jaya yaitu Lingkungan I - Lingkungan X.

Adapun dalam hal kepemimpinan riwayatnya bisa dilihat pada tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jabatan</b>
1	Syafarudin	1950 s/d 1970	Kepala Desa
2	M. Satir	1970 s/d 1974	Kepala Desa
3	H.S Arifin	1974 s/d 1979	Kepala Desa
4	Sihino	1979 s/d 1989	Kepala Desa
5	Medi Warsito	1989 s/d 1995	Kepala Desa
6	Bambang Jusioanto	1995 s/d 2003	Kepala Desa
7	Tusin Efendi	2003 s/d 2008	Lurah
8	Wasyadi	2008 s/d 2009	Lurah
9	Zulfikar Irawan, S.Sos	2009 s/d 2010	Lurah
10	Azhari Sentral	2010 s/d 2011	Lurah
11	Supandi	2011 s/d 2012	PLT Lurah
12	Joni Darwin, S.Ip	2012 s/d 2013	PLT Lurah
13	Joni Darwin, S.Ip	2013 s/d Sekarang	Lurah

## 2. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kelurahan Yukum Jaya terletak pada dataran +- 65 meter diatas permukaan laut, yang dikelilingi oleh irigasi teknis sebagai perbatasan dengankampung dan kelurahan tetangga. Luas Kelurahan Yukum Jaya +-782 Ha. Dengan luas sedemikian kelurahan Yukum Jaya menghimpun beberapa kawasan diantaranya :

No	Nama Kawasan	Luas
1	Sawah	90,82 Ha
2	Peladang	18 Ha
3	Pemukiman, Ruko serta Pekarangan	672,96 Ha
4	Perkebunan	6,75 Ha
5	Kolam	1,67 Ha
6	Rawa	0,5 Ha
7	Tempat Umum dll	9,3 Ha

Adapun batas-batas Kelurahan Yukum Jaya:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Terbanggi Besar dan KampungPoncowati.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Karang Endah. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Adi Jaya.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bandar Jaya Barat danKelurahan Bandar Jaya Timur.

Jenis tanah Kelurahan Yukum Jaya sebagian besar padsolik merah kuningdengan drainase sedang cukup baik. Kedalaman berkisar 15-20 cm, adapuntingkat PH berkisar 4-7 berdasarkan catatan curah hujan selama 5 tahun terakhir.Riwayat hujan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan rata-rata 799 mmkemudian riwayat curah hujan

terendah terjadi pada tahun 2011 dengan curahrata-rata 52,25 mm per bulan.

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yang dilihat dari ke lima aspek indikator, yakni disimpulkan sebagai berikut:

1. Efisiensi kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dengan cara pengembangan aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah), memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis oleh pemerintah dan swasta, pemberian kemudahan perizinan bagi para pelaku UMKM telah memudahkan para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya, serta mempersingkat waktu pemasaran, dengan adanya akses yang mudah bagi konsumen, sehingga produsen dan konsumen dapat lebih efisien dalam melakukan transaksi.

Beberapa kekurangan dari kebijakan tersebut antara lain, masih terbatasnya fitur-fitur yang ada di aplikasi UMKM Berjaya, kemudian sumber daya manusia pada pelaku UMKM yang masih banyak belum fasih dalam memanfaatkan fasilitas tersebut menjadikan kebijakan tersebut masih

belum maksimal. Serta lamanya proses *approve* produk dan akun pemasar menjadi hal yang juga dikeluhkan oleh pengguna.

2. Kecukupan kebijakan pengembangan aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah), memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis oleh pemerintah dan swasta, pemberian kemudahan perizinan bagi para pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi unsur kepuasan, baik dari Dinas dari dalam menunjang efektivitas kebijakan pemasangan alat *Tapping Box* tersebut sudah memenuhi unsur kepuasan, baik dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah maupun dari para pelaku UMKM. Pelaku UMKM terbantu dengan adanya kebijakan tersebut terutama adanya aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah) serta pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah yang membuat para pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas mereka.
3. Perataan kebijakan pengembangan aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah), memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis oleh pemerintah dan swasta, pemberian kemudahan perizinan bagi para pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi unsur perataan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah menysasar seluruh masyarakat Lampung Tengah yang memiliki potensi wirausaha khususnya pada sektor-sektor strategis

Kabupaten Lampung Tengah yakni sektor pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan UMKM yang berbasis kuliner.

4. Responsivitas kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah dan para pelaku UMKM sudah saling memberikan respon yang baik terhadap kebijakan. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah merespon kesulitan para pelaku UMKM dengan membuat kebijakan dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Kemudahan yang diberikan seperti menyederhanakan prosedur perijinan melalui *One Single Submission* (OSS). Kemudian memberi keringanan biaya perijinan bagi pembentukan Usaha Kecil dan pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
5. Ketepatan pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah), memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis oleh pemerintah dan swasta, pemberian kemudahan perizinan bagi para pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah saat ini kebijakan yang paling menguntungkan. Pemindahan atau relokasi UMKM yang terdampak adanya jalan tol dan pandemi covid-19 khususnya yang berada di Kelurahan Yukum Jaya merupakan salah satu solusi selain kebijakan di atas yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM agar para pelaku UMKM dapat bertahan pada situasi seperti ini, namun kebijakan ini masih menunggu kesepakatan dari Pemprov Lampung dan Hutama Karya sebagai pengelola jalan tol.

## B. Saran

Untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan para pelaku UMKM yang terdampak peresmian jalan tol di Kelurahan Yukum Jaya, ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan yaitu:

1. Penyempurnaan aplikasi UMKM Berjaya (Lampung Tengah).
2. Sosialisasi Aplikasi yang lebih menyeluruh.
3. Mengiklankan Aplikasi ini keseluruhan masyarakat agar lebih banyak pengguna dan konsumen.
4. Proses *approve* produk dan akun pemasar harusnya dapat lebih dipercepat.
5. Pelatihan yang mendukung proses penggunaan media sosial dalam pemasaran yang lebih efektif dan efisien seperti digital marketing, sistem afiliasi dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava media. Yogyakarta
- Moleong Lexy J, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik*. CV Adoya Mitra Sejahtera. Jakarta
- Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Research Centre for Politics and Government Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Siagian, sondang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Suharno. 2013. *Pembelajaran Kebijakan Publik*. Ombak. Yogyakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wibawa, Samudra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta

### **Sumber Lain :**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM

**Website :**

<https://economy.okezone.com/read/2019/01/15/320/2004680/jalan-trans-papua-ditargetkan-tersambung-tahun-ini>

[https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d/4435071/omzet-pedagang-telur-asin-pantura-turun-70-sejak-ada-tol-transjawa\\_ga=2.206527765.721693326.1572678558-231585951.1543546223](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d/4435071/omzet-pedagang-telur-asin-pantura-turun-70-sejak-ada-tol-transjawa_ga=2.206527765.721693326.1572678558-231585951.1543546223)

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4663471/hingga-akhir-2019-jalan-tol-yang-dioperasikan-capai-1387-km>

<https://www.beritasatu.com/nasional/460104/wapres-ingatkan-tol=padangpekanbaru-bisa-matikan-ekonomi>